



BPK Soroti Adminduk, Dewan Bentuk Pansus

UMBULHARJO (MERAPI) - DPRD Kota Yogyakarta resmi membentuk panitia khusus untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dalam catatan BPK ada beberapa permasalahan yang dinilai mempengaruhi efektivitas pelayanan adminduk kepada masyarakat.

"Temuan BPK misalnya terkait pemanfaatan data kependudukan yang belum optimal. Ini berkaitan dengan sistem. Kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, maka kemudahan pelayanan yang harusnya segera didapat, belum bisa diterima," kata anggota Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait administrasi kependudukan (adminduk), Bambang Anjar Jalumurti, Senin (8/1).

Dalam temuan BPK atas penyelenggaraan adminduk di Kota Yogyakarta tahun 2015 hingga semester I tahun 2017, ditemukan empat permasalahan signifikan dalam penyelenggaraan adminduk. Pertama Pemkot Yogyakarta belum sepenuhnya menetapkan regulasi, kebijakan dan pedoman yang mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kedua pemkot dinilai belum optimal mendorong penduduk dan berkoordinasi dengan instansi lain untuk melaporkan peristiwa kependudukan.

Ketiga pemkot dinilai belum optimal dalam menyajikan data dan informasi adminduk dengan kualitas data yang akurat, mutakhir dan

lengkap. Keempat pemkot belum optimal merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pemanfaatan data kependudukan.

Diakuinya beberapa temuan dan catatan sudah mulai dilaksanakan Pemkot Yogyakarta. Misalnya terkait pelayanan adminduk yang terintegrasi dengan instansi lain seperti rumah sakit. Namun belum seluruh rumah sakit atau instansi pelayanan yang memanfaatkan data adminduk. Dia mencontohkan, optimalisasi data kependudukan misalnya integrasi antar instansi untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan di rumah sakit. "Saat ada kelahiran di rumah sakit, data untuk kartu keluarga dan akta kelahiran bisa terkoneksi dengan adminduk, sehingga masyarakat tidak perlu mengurus ke sana kemari," tuturnya.

Menanggapi hal itu Kepala Dindikcapil Kota Yogyakarta Sisruwadi menyatakan beberapa catatan dan rekomendasi BPK tersebut sudah dilaksanakan instansinya. Tapi pihaknya beralasan selama ini langkah itu tidak pernah didokumentasikan dengan baik. Misalnya dalam distribusi e-KTP yang akhirnya tidak dapat ditemukan pemiliknya karena meninggal.

"Untuk kerja sama dengan instansi lain terkait peristiwa kependudukan seperti perubahan status kami sudah koordinasi dengan Kemenag dan dua kantor urusan agama. Jadi itu sebenarnya sudah kami lakukan dan akan ditingkatkan," ucap Sisruwadi. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005